

Membudayakan Moderasi Melalui Program Penguatan Moderasi Beragama

Ni Putu Listiawati

Institut Agama Hindu Gde Pudja Mataram, Indonesia
niputulistiawati66@iahn-gdepudja.ac.id

Abstract

The rise of religious and cultural intolerance, conflict between and among religious adherents, and even the nation's disintegration have given rise to a national program to strengthen religious moderation. Aims to examine and describe the culture of moderation in planning to strengthen religious moderation, describe the approach to the culture of moderation in program implementation, and analyze the monitoring and evaluation of program implementation carried out by the Hindu Community Guidance Sector work unit of West Nusa Tenggara Province. To answer these three objectives, 3 (three) theories are used: contingency approach, systems theory, and Anthony Giddens' structuration theory. This study uses a qualitative phenomenological paradigm. Technique for determining informants purposively with criteria, as participants, committee, planner, and person in charge. It can be concluded: 1) cultivating moderation in the planning of the program to strengthen religious moderation in the work unit of the Hindu Guidance Division of West Nusa Tenggara Province, targeting the strengthening of the Pancasila ideology in the nation and state and strengthening Hindu values that are inspired by religious moderation; 2) the implementation approach cultivates moderation, not yet innovative. The participants involved were still homogeneous. The program's target is still limited to understanding tolerance and not yet formulating a model of tolerance for a multicultural society; 3) monitoring and evaluating the cultivation of moderation in the Hindu Guidance Sector of the Regional Office of the Ministry of Religion of NTB Province using the Formative Summative Evaluation Model. It can be recommended: 1) the proposed program is expected to be more innovative, 2) religious moderation agencies (subjects) should involve a lot of leadership elements at the spearhead (close to the community), and be heterogeneous.

Keywords: Implementation; Strengthening Program; Moderation; Religion

Abstrak

Maraknya intoleransi agama dan budaya, konflik inter dan antar pemeluk agama, sampai kepada disintegrasi bangsa memunculkan program nasional penguatan moderasi beragama. Bertujuan mengkaji dan mendiskripsikan pembudayaan moderasi pada perencanaan penguatan moderasi beragama, menggambarkan pendekatan pembudayaan moderasi dalam pelaksanaan program dan menganalisis pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program yang dilakukan oleh satuan kerja Bidang Bimas Hindu Provinsi Nusa Tenggara Barat. Untuk menjawab tiga tujuan ini digunakan 3 (tiga) teori yaitu, teori pendekatan *kontijensi*, teori sistem, dan teori *strukturasi* Anthony Giddens. Kajian ini menggunakan paradigma kualitatif fenomenologis. Teknik penentuan informan dengan purposif dengan kriteria, sebsagai peserta, panitia, perencana, dan penanggungjawab. Dapat di simpulkan: 1) membudayakan moderasi pada perencanaan program penguatan moderasi beragama satuan kerja Bidang Bimas Hindu Provinsi Nusa Tenggara Barat, menysasar penguatan idiologi pancasila dalam berbangsa, bernegara dan penguatan nilai-nilai Hindu yang bernafaskan moderasi beragama; 2) pendekatan pelaksanaan membudayakan moderasi, belum inovatif. Peserta yang terlibat masih *homogen*. Sasaran

program masih sebatas pemahaman toleransi belum kepada merumuskan model toleransi masyarakat multikultur; 3) pemantauan dan evaluasi Pembudayaan moderasi pada Bidang Bimas Hindu Kanwil Kemenag Provinsi NTB menggunakan model *Formatif Sumatif Evaluation Model*. Dapat direkomendasikan, 1) usulan program diharapkan lebih inovatif, 2) agensi-agens (subjek) moderasi beragama sebaiknya banyak melibatkan unsur pimpinan di ujung tombak (dekat masyarakat), dan heterogen.

Kata Kunci: Implementasi; Program Penguatan; Moderasi; Beragama

Pendahuluan

Masyarakat Indonesia sering dipertontonkan tindakan kekerasan antar dan inter pemeluk agama. Agama menampilkan wajah bengis. Maraknya intoleran dan konflik ditengah masyarakat beragama dan berbudaya mampu mendorong disintegrasi bangsa. Pentingnya Negara hadir lewat program nasional seperti program penguatan moderasi beragama yang tertuang kedalam RPJMN 2020-2024. Fakta dan data keragaman agama-agama di Indonesia merupakan mozaik yang memperkaya khazanah kehidupan keagamaan di Indonesia, namun disisi lain keragaman agama juga mengandung potensi ancaman bagi persatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Disinilah diperlukan keterlibatan seluruh warga masyarakat dalam mewujudkan kedamaian (Akhmadi, 2019:48). Faktor pemicu kekerasan disebabkan oleh konflik yang ditangani secara keliru. Konflik menjadi penyebab untuk melakukan kekerasan, karena dibalik bentuk kekerasan disebabkan oleh konflik yang terabaikan (Sutanto,2005 dalam Akhmadi, 2019).

Mencermati fenomena keberagaman di tanah air dewasa ini ditunjukkan dengan pergerakan terorisme semakin masif, seperti ujaran wakil presiden Ma'ruf saat menghadiri wisuda program sarjana ke 60, program magister ke-24, dan program doktor ke-8 universitas Krisnadwipayana (UNKRIS) selasa, 6 April 2021, bahwa “akhir-akhir ini terorisme kembali mengganggu kedamaian tanah air. Hal ini telah membuktikan bahwa sangat mudah gagasan radikalisme masuk kedalam pikiran seseorang“ (<https://t.me/Kompascomupdate>). (Kompas.com, n.d.). Kajian penulis memiliki relevansi dengan Artikel yang ditulis oleh Akhmadi tahun 2019, mengenai kesadaran dan pemahaman tentang keragaman budaya, moderasi beragama, dan peran penyuluh, telah memberikan gambaran dalam membangun keharmonisan beragama. Tujuan artikel Akhmadi adalah, peran penyuluh agama dalam menjaga keharmonisan hidup bangsa Indonesia dalam bingkai keragaman budaya. Pendekatan kajian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan subjek penyuluh sebagai informan utama, dan para pemuka adat, agama serta beberapa masyarakat di lokus penelitian. Sama halnya dengan kajian penulis saat ini menggunakan pendekatan kualitatif fenomenologi, hanya saja subjek kajian penulis ada pada perencanaan program, pelaksana program, penanggung jawab program. Akhmadi menggunakan analisis dengan teori strukturasi. Sedangkan penulis saat ini menggunakan tiga teori secara ekletik. Kesimpulan kajian dari akhmadi yaitu: diperlukan peran pemerintah, tokoh masyarakat, dan para penyuluh agama untuk mensosialisasikan, menumbuh-kembangkan wawasan moderasi beragama terhadap masyarakat Indonesia agar terwujud keharmonisan dan kedamaian.

Rekomendasi kajiannya, ditujukan kepada pemerintah khususnya Kementerian Agama, Balai Diklat Keagamaan, serta penyuluh agama. Moderasi beragama sebaiknya dilakukan melalui pendidikan, pelatihan, penyuluhan terhadap masyarakat, serasehan, dan dialog kebangsaan. Hasil telaah artikel jurnal Akhmadi ini memberikan wawasan bagi penulis bahwa, Kementerian Agama dengan struktur organisasi yang gemuk mampu mencapai pemeluk agama lapisan bawah di seluruh wilayah nusantara. Kementerian

Agama memiliki peran penting dalam upaya mewujudkan tujuan moderasi beragama yang dicanangkan pemerintah sampai ke-akar rumput.

Kajian Sumarto tentang “Penerapan nilai-nilai moderasi beragama di Bali Studi Kerja Sama Rumah Moderasi Beragama IAIN Curup Di Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Bali” (Sumarto, 2021). Kajian Sumarto menemukan adanya sikap apresiatif antara Etnis Bali yang beragama Hindu, dengan etnis lain terutama Jawa dan Bugis yang beragama Islam merupakan salah satu indikator terwujudnya masyarakat Multikultural yang moderat di Bali. Selain itu terlihat pergaulan sesama orang Bali yang berbeda agama, bisa hidup saling berdampingan, misalnya Hindu dan Katolik menjadi indikator lainnya. Pada hakekatnya Agama Hindu mengenal Moderasi beragama sejak dulu kala, tersurat pada susastra *veda*. Agama Hindu banyak yang menyebutkan sebagai agama universal dan agama spiritual, banyak ditemukan ajaran, *sloka-sloka*, mantram yang berhubungan dengan moderasi beragama dan toleransi beragama. Artikel penulis memiliki sedikit perbedaan pada objek kajian. Sumarto lebih menekankan pada penerapan nilai-nilai moderasi beragama, sedangkan artikel penulis mengangkat objek pembudayaan moderasi dalam program moderasi beragama. Artikel ini Sama-sama menggunakan pendekatan kualitatif, dan sama-sama menggunakan metode pengumpulan data observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Karya Hamidulloh Ibda dan Aji Sofanudin, bertema program gerakan literasi *Ma'arif* (GLM) Lembaga Pendidikan *Ma'arif* NU Jawa Tengah. Periode penelitian pada tahun 2018-2023. Lokasi penelitian pada Lembaga pendidikan *Ma'arif* NU Jateng (Ibda & Sofanudin, 2021). Sedangkan artikel penulis membahas tema membudayakan moderasi melalui penguatan program moderasi beragama dengan lokus di NTB. Metodologi penelitian yang dipakai yaitu metode kualitatif. Persamaan artikel Hamidulloh ibda dan Aji Sofanudin dengan artikel penulis sama-sama menggunakan teknik pengumpulan data observasi, dokumentasi, dan wawancara dan Objek penelitian sama-sama pada penguatan moderasi beragama. Hasil kajian ini menemukan moderasi beragama melalui program Gerakan Literasi *Ma'arif* (GLM) sangat efektif dalam membentuk karakter literat dan moderat, yang bersumber dari karakter dalam Penguatan Pendidikan Karakter (PPK), prinsip dasar *Aswaja Annahdliyah, Ukhuwah Nahdliyah, dan Mabadi Khaira Ummah*. Dampak yang dirasakan, adalah mampu menjadikan guru dan siswa literat dan moderat (Ibda & Sofanudin, 2021). Ada hal menarik yang didapat penulis dengan membaca artikel program gerakan literasi Ibda yaitu, memahami program-program menarik dan khas sesuai kebutuhan masyarakat lokal terkait upaya penguatan moderasi beragama. Disamping itu memberikan gambaran yang khas dalam implementasi dari program literasi untuk penguatan pemahaman moderasi beragama. Penulis dapat mendalami penggunaan pendekatan penelitian dengan metode kualitatif yang sama-sama dipergunakan dalam penelitian penulis saat ini.

Kitab *Bhagawadgita* (Pudja, 2019), disadur oleh G. Pudja M.A., S.H. Kitab ini banyak mengandung muatan-muatan moderasi beragama diantaranya pada *Bhagawadgita (Pancama Veda) adhyaya V sloka 18, sloka 19, sloka 25*, yang tersurat pada *sloka 18*, “Orang arif bijaksana melihat semuanya sama, baik *Brahmana* budiman dan rendah hati maupun seekor sapi, gajah dan anjing ataupun orang hina papa, tanpa *kasta*.” Pada *sloka 19* ternarasikan “Bahkan didunia sekalipun, kelahiran diatasi oleh mereka yang pikirannya sama seimbang, karena sesungguhnya *Brahman* adalah sempurna dan sama. karena itu merekapun ada dalam *Brahman*.” *Sloka 25* tertulis “Orang suci yang dosanya telah dimusnahkan, keragu-raguannya telah dihapus, pikirannya dipusatkan, kebahagiaannya berbuat kebajikan bagi mahluk semua, dia akan mencapai *nirwana*, bersatu dengan *Brahman*.” Narasi ini dipahami untuk dua sisi agama, yaitu yang pribadi dan sosial, ditekankan oleh *Gita*. Secara pribadi, kita harus menemukan sifat

ilahi yang ada dalam diri kita dan membiarkannya meresapi sifat kemanusiaan kita; sedang sisi sosialnya, masyarakat itu sendiri harus dilembutkan menjadi gambaran ilahi. Manusia bukan hanya meningkatkan dunia spiritual tetapi juga meningkatkan dunia mahluk-mahluk. Diperkuat dalam *adhyaya VI sloka 29 – 32*. *Sloka 29* dinarasikan: “Dia melihat *atma* ada pada semua insan dan semua insan ada pada *atman*, dimana-mana ia melihat yang sama, adalah dia yang jiwanya terselaraskan dalam Yoga.” Dilanjutkan pada *sloka 30* tertulis: “ Dia yang melihat Aku dimana-mana dan melihat segalanya ada pada-Ku. Aku tak bisa lepas dari padanya dan dia tak bisa lepas dari pada-Ku.” Dilanjutkan dengan tulisan *sloka 31*, ”Dia yang memuja Aku yang bersemayam pada semua insan, dengan tujuan manunggal, *yogi* yang demikian itu dapat tinggal dalam diri-Ku, walau bagaimanapun cara hidupnya. ”Diperjelas lagi pada *sloka 32*, tertulis “*Yogi* yang dianggap tertinggi adalah yang melihat dimana-mana sama *atman* itu sebagai *atman*-nya sendiri, wahai Arjuna, baik dalam suka maupun dalam duka.” Pemikiran pada empat *sloka* sebelumnya, juga terdapat didalam Manawadharmasastra XII.91. Lebih jauh tertulis pada *adhyaya IX sloka 29, sloka 30*. Pada *sloka 29*, “Aku adalah sama bagi semua mahluk; bagi-Ku tiada yang terbenci dan terkasihi; tetapi mereka yang berbhakti padaKu dengan penuh pengabdian, mereka ada padaKu dan Aku ada pada mereka.” Lebih lanjut dipertegas pada *sloka 30*, “Bahkan seandainya seorang yang terjahat sekalipun yang memuja Aku dengan pengabdian yang terpusat, ia harus dipandang ada di jalan yang benar sebab ia telah bertindak menuju yang benar” (Pudja, 2019).

Kajian ini menggunakan 3 (tiga) teori secara ekletik, yaitu: 1) Teori Pendekatan *Kontijensi*; 2) Teori Sistem; 3) Teori *strukturasi* Anthony Giddens. Fokus kajian pada, mengkaji dan mendiskripsikan pembudayaan moderasi pada perencanaan penguatan moderasi beragama, menggambarkan pendekatan pembudayaan moderasi dalam pelaksanaan program dan menganalisis pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program. Manfaat kajian Penulis, memberikan gambaran pembudayaan moderasi dan pelembagaan moderasi beragama kedalam kebijakan dan program pemerintah, gagasan memperkuat ideologi dengan internalisasi nilai-nilai inklusif dan toleran dalam kehidupan beragama; Sebagai evaluasi mendukung program moderasi beragama relevan bagi masyarakat multikultural; Tersedianya kajian tentang moderasi beragama dari aspek membudayakan moderasi dalam implementasi program kerja Bidang Bimas Hindu. Konsep dari objek penelitian: Membudayakan Moderasi beragama merupakan upaya mentradisikan dalam masyarakat penganut religi agar tidak radikal. Konsep Implementasi program penguatan, berupa tercapainya internalisasi nilai moderasi, ada tujuan program, ada sasaran program berupa tercapainya indikator moderasi keberagamaan, ada ketepatan metode pelaksanaan yang dipilih, ada ketepatan materi penguatan moderasi beragama, dan subjek program (agent) penguatan moderasi beragama. Konsep penguatan Moderasi Beragama, suatu upaya untuk meningkatkan dan mendorong kesadaran masyarakat dalam praktek beragama mencakup: komitmen kebangsaan, toleransi, anti kekerasan, penghormatan terhadap tradisi.

Metode

Data primer dan data sekunder dikumpulkan dengan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Data primer diperoleh dari wawancara, observasi dengan informan dari unsur perencana, panitia, kepala bidang, peserta dan data sekunder berupa dokumen-dokumen dari badan pusat statistik, dan data RPJMN, Renstra, RKKL bidang bimas Hindu prov. Nusa Tenggara Barat, laporan kegiatan dan foto kegiatan. Pendekatan penelitian menggunakan pendekatan kualitatif fenomenologis. Crosswell, menjelaskan ada lima tipe penelitian kualitatif yaitu studi fenomenologi, studi etnografi, studi kasus (*case study*), dan studi biografi (Cresswell, 2010).

Berdasarkan wujud dan sifat-sifat data, maka teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik deskriptif yang dilakukan melalui tiga alur kegiatan yaitu: (1) reduksi data, (2) penyajian data dan (3) penarikan kesimpulan atau verifikasi. Ketiga cara tersebut saling berkaitan dan merupakan alat kegiatan analisis yang memungkinkan data menjadi bermakna. Uji keabsahan data dilakukan melalui teknik triangulasi, yaitu triangulasi sumber data dengan mengambil 9 orang informan, triangulasi metode pengumpulan data yaitu menggunakan metode observasi dan wawancara terhadap setiap informan.

Hasil Dan Pembahasan

Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) memiliki luas daratan 20.153,15 km², terletak pada posisi 8⁰10'–9⁰5' lintang selatan dan 115⁰46'–119⁰5' bujur timur, keberadaannya diapit disebelah timur Pulau Bali (Provinsi Bali) dan disebelah barat Provinsi Nusa Tenggara Timur. Wilayah NTB meliputi dua pulau besar (Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa) dan ada beberapa pulau kecil yang terbentang di lautan sekitarnya. NTB berbatasan dengan Laut Flores dan Laut Bali disebelah utara, Samudera Indonesia di sebelah selatan, Selat Lombok di sebelah barat, dan Selat Sape di sebelah timur. Penduduk NTB pada tahun 2010 berjumlah 4.500.212 jiwa. Pada tahun 2020 berjumlah 5.320.092 jiwa. Di tahun 2020 terjadi peningkatan 819.880 jiwa (Badan Pusat statistik, n.d.). Data jumlah penduduk yang dikeluarkan BPS NTB menunjukkan tingginya pertumbuhan penduduk di wilayah NTB, masih diperlukan peran pemerintah daerah menurunkan ledakan jumlah penduduk, khusus di Kabupaten Lombok Timur, Lombok Tengah dan Lombok Barat.

Agama yang dianut penduduk pulau Lombok pada tahun 2018 (Bappeda Nusa Tenggara Barat, 2013) ada enam agama hidup berdampingan yaitu: agama Islam rata-rata 93,706% penduduk; agama Hindu rata-rata 4,6% penduduk; agama Budha rata-rata 1,1% penduduk; agama Kristen rata-rata 0,4%; agama Katolik rata-rata 0,2%; agama Kong Hu Cu rata-rata 0,002%. Sampai saat ini agama Islam, agama mayoritas penduduk pulau lombok, kemudian diikuti oleh agama Hindu. Tempat ibadah di Pulau Lombok pada tahun 2014 tercatat mesjid (3.822 buah), Pura (347 buah), gereja Protestan (21 buah), Vihara (16 buah), terakhir gereja Katolik (5 Buah).

Menurut sejarah penghuni pertama NTB berasal dari kawasan Asia Tenggara. Sebagian besar penduduk bertempat tinggal di Pulau Lombok. Nama Lombok diambil dari kitab *Negarakertagama*, karya *Empu Prapanca*. Dalam buku ini, Lombok barat disebut “Lombok *Mirah*”, dan Lombok Timur disebut “*Sasak Adi*”. Sedangkan dalam babad Sangupati, pulau Lombok dikenal bernama “Pulau Meneng”, diakhir abad ke 19 disebut Pulau Seleparang (Raba Manggaukang dan Asamawati MP, 2002). Penduduk asli pulau Lombok disebut Suku Sasak. Sedangkan Penduduk asli Pulau Sumbawa ada dua yaitu Suku Samawa, dan Bima. Disamping penduduk asli ada juga kaum pendatang dari berbagai daerah seperti: Bali, Sulawesi Selatan, Jawa, Kalimantan, Sumatra, Maluku, dan Nusa Tenggara Timur. Dengan adanya pendatang menimbulkan alkulturasi budaya maupun alkulturasi keturunan. Kehidupan multikultural dan multi agama di tempat-tempat tertentu memunculkan konflik kesukuan, konflik keyakinan dan kepercayaan.

Kota Mataram sebagai Ibukota NTB ada di Pulau Lombok, menjadi pusat pemerintahan provinsi dan Kota-Kabupaten dan banyak perkantoran pemerintah maupun bisnis di wilayah ini. Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi NTB salah satunya ada di jalan Udayana Kota Mataram. Sejarah Kanwil Kementerian Agama NTB berawal dari pendirian Kementerian Agama Republik Indonesia pada tanggal 2 Januari 1946, kabinet Syahrir/Kabinet Parlemerter I. HM. Rasyidi diangkat sebagai Menteri Agama I, berpasangan dengan sekretaris jenderal Kementerian Agama Mr. A. Soebagyo.

Berdasarkan penetapan Presiden RI No. 5/SD, tgl. 25 Maret 1946, tugas pokok kementerian Agama saat itu adalah menampung urusan Mahkamah Islam Tinggi (*Hoor foor Islamitiesche Zaken*) yang sebelumnya menjadi wewenang Departemen Kehakiman (*Devartment van Justitie*). Tugas pokok itu diperkuat dengan Maklumat Pemerintah (No.2, tanggal 23 April 1946), yakni menampung tugas dan mengangkat *Penghoeloe Landraad*, *Penghoeloe*, Anggota Pengadilan Agama dan *Penghoeloe Masdjit* serta para pegawainya, yang sebelumnya menjadi wewenang Residen dan Bupati. Sedangkan Kantor Kanwil Kementerian Agama RI Provinsi NTB berdiri pada tahun 1971. Berikut nama kepala kantor wilayah yang pernah dan sedang memimpin. Berikut nama kepala kantor wilayah yang pernah dan sedang memimpin.

1. H. L. Zainuddin Mansur, MA. (1971- 1975)
2. H. Lalu Nuruddin, SH. (1975- 1985)
3. Drs. H. Abdul Fattah (1985- 1987)
4. H. Lalu Untja (1988-1992)
5. Drs. HM. Saleh Harun (1993-1995)
6. HM. Tubat (1995-1998)
7. Drs. H. Muchibuddin Abbas, SH. (1998-2002)
8. Prof. Drs. H. Saiful Muslim, MM. (2002- 2003)
9. Drs. H. Lalu Mahfudz, MM. (2003-2006)
10. H. Lalu Suhaimi Ismy (2006-2012),
11. Drs. H. Usman (2012-2014)
12. Drs. H. Sulaiman Hamid, SH, MH (2014-2017)
13. H. Nasruddin, S.Sos, M.Pd.I (2017 sd. 2020)
14. Dr. H.Zaidi Abdad..M.Ag. (2020 Sd tulisan ini disusun)(Kementerian Agama Nusa Tenggara Barat, 2017).

Kanwil Kementerian Agama provinsi NTB membawahi 10 (sepuluh) Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota, yaitu: 1. Kemenag Kota Mataram; 2. Kemenag Lombok Barat; 3. Kemenag Lombok Tengah; 4. Kemenag Lombok Utara; 5. Kemenag Lombok Timur; 6. Kemenag Sumbawa; 7. Kemenag Sumbawa Barat; 8. Kemenag Dompu; 9. Kemenag Bima; 10. Kemenag Kota Bima. Sejarah mencatat dari tahun 1975 sampai dengan tahun 2022 berikut ini nama-nama pembimas dan kepala bidang Bimas Hindu kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi NTB berikut.

1. Ida Made Oka menjabat periode 1975s/d1976 sebagai pembimas Hindu dan Budha;
2. I Ketut Lagas menjabat periode 1977-1988 sebagai Kepala Bidang Hindu dan Budha;
3. I Gede Bajrayasa, B.A menjabat periode 1989-1995
4. Drs. I Nengah Wadrana, B.A menjabat periode 1995-1998
5. I Gusti Bagus Parwata, menjabat periode 1998-2000
6. I Nyoman Sumarhadika, Bsc, S. Ag, menjabat 2001-2003
7. Drs. I Ketut Nuasa, M.Ag, menjabat 2004-2012
8. I Wayan Widra, S.Ag., M.Pd., H., menjabat 2013-2021
9. I Gd Suberata, SE., S.Ag., menjabat 2021-sekarang.

1. Mekanisme pembudayaan moderasi pada Perencanaan Program Penguatan Moderasi Beragama Bidang Bimas Hindu Kanwil Kemenag NTB.

Di dalam mandat RPJMN ada 5 poin penting untuk mewujudkan moderasi beragama di tanah air yaitu: 1) penguatan cara pandang, sikap, dan praktik beragama dalam perspektif jalan tengah; 2) penguatan harmoni dan kerukunan umat beragama; 3) penyelarasan relasi agama dan budaya; 4) peningkatan kualitas pelayanan kehidupan beragama; 5) pengembangan ekonomi dan sumberdaya keagamaan (Kementerian Agama, 2020). Melihat Sasaran Strategis Kemenag RI, penguatan moderasi beragama

ada pada sasaran strategis ke dua, yaitu menguatnya moderasi beragama di Indonesia. Untuk itu ada upaya mewujudkan tujuan dan sasaran strategis ini dengan cara penguatan moderasi beragama dari sisi pengetahuan, dan perilaku aparaturnegara dan seluruh masyarakat Indonesia, maka didoronglah suatu program penguatan moderasi beragama yang disusun secara nasional tahun 2019 di kementerian pusat, kemudian usulan program satker dan unit-unit kementerian Agama baru dimulai pada tahun 2020.

Struktur organisasi pada satker Bidang Bimas Hindu mengatur pelaksanaan tugas sebagai fungsi: a. penyediaan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis serta perencanaan dibidang urusan agama, pendidikan agama, dan pendidikan keagamaan Hindu; b. pelayanan dan pemenuhan standar pelayanan urusan agama Hindu dan standar nasional pendidikan Hindu; c. bimbingan teknis dan supervisi dibidang penguatan dan bina lembaga, pengembangan program kepenyuluhan dan bina penyuluh agama, pengembangan program pemberdayaan dan bina umat, pendidikan agama dan pendidikan keagamaan Hindu, serta pengelolaan data dan sistem informasi bimbingan masyarakat Hindu; dan d. evaluasi dan penyusunan laporan di bidang urusan agama, pendidikan agama dan pendidikan keagamaan Hindu (Kementerian Agama, 2019).

Menurut Bapak Kepala Bidang Bimas Hindu Kanwil Kemenag NTB, untuk program penguatan moderasi beragama dilakukan secara serentak dimulai dari tahun 2019 sampai tahun 2024 kedepan sesuai amanat renstra. Lebih jauh Bapak Kepala Bidang Bimas Hindu kanwil NTB melakukan pembentukan agent moderasi beragama dari kelompok penyuluh, guru, pasraman, tokoh adat, tokoh agama dan ormas pemuda. Program penguatan moderasi beragama menjadi program prioritas Bidang Bimas Hindu Kanwil Kemenag NTB sampai tahun 2024. Dalam membudayakan moderasi pada program penguatan di Bidang Bimas Hindu dengan menysasar pada penguatan idiologi berbangsa dan bernegara serta penguatan nilai-nilai Hindu yang bernafaskan moderasi beragama. Informasi dari bapak kepala bidang ditambahkan oleh Bapak Ida Bagus Indra selaku perencana “Adapun embrio program penguatan moderasi beragama berawal pada tahun 2016 digagas oleh Bapak Lukman Hakim Saifuddin, pada saat itu beliau sebagai menteri Agama Republik Indonesia. Selama tahun 2016–2019 program penguatan moderasi beragama masih pada tahap kajian konseptual. Program ini disusun sesungguhnya untuk menjawab tantangan dari semakin kuatnya anarki keagamaan dalam bentuk terorisme, menguatnya politik identitas, dan maraknya perilaku intoleran. (wawancara pada tanggal 4 Juni 2022). Dilanjutkan kembali wawancara dengan Gus Indera pada tanggal 17 Juni 2022 berkaitan usulan perencanaan program penguatan moderasi beragama dan pengembangan kapasitas lembaga keagamaan Hindu memiliki tujuan program berupa: mensinergikan dan mensosialisasikan, meningkatkan pengembangan kapasitas lembaga yang berkualitas dan akuntabel; meningkatkan pemahaman pengurus lembaga tentang moderasi beragama; meningkatkan peranserta pengurus lembaga agama dan keagamaan Hindu dalam pembinaan umat.

Pada wawancara 15 Juli 2022 diperoleh informasi dari Bapak Pande Putu Dwi Telaksana mengenai proses pengajuan perencanaan program yang dilalui saat menyusun dan mengajukan program berikut.

Awalnya saya melakukan orientasi penyusunan dan pengajuan program diawali dengan mengacu pada renstra, renja kanwil provinsi NTB, saat menyusun TOR dan RAB. TOR dan RAB tersusun T-1 dari kegiatan yang akan dilaksanakan untuk dibawa ke sidang *tripartid* antara Bapenas, kementerian keuangan dan kementerian Agama. Sidang ini akan menghasilkan pagu sementara. Pagu sementara dilanjutkan pembahasan ke Dewan Pertimbangan Rakyat oleh Menteri Agama dan eselon satu untuk menjadi pagu anggaran. Saat ini semua proses telah dilakukan secara online di Sakti.

Pernyataan Pande Putu Dwi Telaksana terkait program mengacu pada renstra dan tujuan di adaptasi dari kebutuhan masyarakat setempat, hal ini sejalan dengan teori sistem yang dikemukakan oleh Shrode (1974) karakteristik dasar sistem sebagai suatu entitas menerapkan pendekatan dengan model input-output (Amirin, 2003). Sistem perencanaan dan pelaksanaan program moderasi beragama sebagai entitas dengan karakteristik *purposive behavior*, yaitu memiliki kegunaan tertentu dan berorientasi kepada tujuan tertentu yang sesuai kondisi di lapangan sebagian besar sudah dipenuhi yaitu terpaparnya cara beragama yang moderat melalui ajaran dalam susastra Hindu yang memiliki nilai-nilai manusia itu bersaudara, saling menghargai dan menghormati. Walaupun tujuan pada rencana program penguatan moderasi beragama dan pengembangan kapasitas lembaga keagamaan Hindu yang disusun dalam TOR masih bersifat umum dan perlu lebih operasional. Tahapan mekanisme perencanaan program pembudayaan moderasi pada tabel 1 berikut.

Tabel 1. Mekanisme Perencanaan Bidang Bimas Hindu



Sumber: Rekonstruksi Penulis

Pengguna output adalah bagian dari lingkungan sistem (*environment*) yaitu agen-agen pengubah yang terdiri dari para pimpinan setiap eselon, para guru, dosen, pemuka adat, dll. Agent pengubah belum melibatkan pimpinan ujung tombak pelayanan umat seperti pemuka adat di tingkat kecamatan dan kelurahan, RT. Ditemukan pula karakteristik *interrelatedness*, yaitu ada keterkaitan antara unsur-unsur dalam sistem (internal) Bidang Bimas Hindu NTB dan keterkaitannya dengan sistem lain termasuk suprasistem-nya (eksternal) di kementerian Agama pusat, telah dilakukan keterkaitan *horisontal* (setiap satker-satker dan pada saat sidang *tripartid*: Bapenas, kementerian keuangan, dan kementerian Agama) maupun *vertikal* (sidang DPR), sampai akhirnya tertuang kedalam DIPA Bidang Bimas Hindu Kemenag NTB.

Secara nasional telah dilakukan perencanaan online melalui sistem sakti. Hal ini menjadikan terpenuhi karakteristik "*control mechanism*" dimana sistem perencanaan ini bisa tetap *survive* dan sesuai kebutuhan pengguna/lingkungannya. Hanya saja penyusunan program di Bidang Bimas Hindu Kanwil NTB, belum memenuhi karakteristik *feedback* atau informasi umpan balik berkelanjutan, baik secara *internal* maupun *eksternal*. Hal ini

tidak sesuai dengan pendapat pakar MC Dermott (1977) (dalam (Tunas, 2007) yang menyatakan bahwa *feedback* adalah hal yang sedemikian pentingnya dalam kehidupan, apabila tidak bisa mencapainya secara langsung, kita perlu menciptakannya agar tetap bisa ada *feedback*. Karena umpan balik sangat penting dilakukan, agar Satker Bidang Bimas Hindu Kanwil NTB dapat mengetahui sejauh mana adanya penyimpangan terhadap program moderasi beragama.

2. Pendekatan membudayakan moderasi dalam Implementasi Program Penguatan Moderasi Beragama Bidang Bimas Hindu Kanwil Kemenag NTB

Internalisasi nilai-nilai penguatan moderasi beragama dengan empat bingkai: 1) bingkai teologis, 2) bingkai politik, 3) bingkai sosiologis, 4) bingkai yuridis. Bingkai teologis dengan mengedepankan teologi kerukunan; bingkai politik dengan menguatkan konsensus kebangsaan, yaitu Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan bhinneka tunggal ika; bingkai sosiologis, melalui pendekatan sosio kultural, dan kearifan lokal; bingkai yuridis berupa kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, hanya dengan itu menurut Ma'ruf Amin (wapres RI) akan mampu menjaga kerukunan, keharmonisan, dan keutuhan bangsa. Hal senada yang disampaikan Bapak I Gde Subrata saat wawancara selaku Kepala Bidang Bimas Hindu Kanwil NTB pada tanggal 5 Agustus 2022 berikut.

Kementerian Agama telah berupaya mempraktekkan beberapa strategi, pendekatan, dan kegiatan untuk mewujudkan dan memelihara kerukunan umat beragama melalui komunikasi intens, dan bentuk kemitraan dengan seluruh aktor-aktor kerukunan dari komponen pimpinan majelis agama, pimpinan ormas keagamaan, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh perempuan, penyuluh agama, dosen, guru agama, dan insan jurnalis. Dengan tujuan para aktor mampu membudayakan sikap moderasi beragama untuk mewujudkan jalan tengah bagi penganut agama di NTB. Sehingga kejadian seperti teror kasus Bom Bali-1 di Sari Club target wisatawan asing oleh pelaku orang Indonesia dengan aliran Al Qaeda dan Jamaah Islamiyah pada tanggal 12 Oktober 2002 dan dilanjutkan dengan Bom Bali -2 yang sempat menghancurkan kepercayaan wisatawan luar negeri dan masyarakat dalam negeri untuk datang ke Bali. Adanya konflik di Pagutan Lombok Kota Mataram karena pelarangan bunyi-bunyian, dan konflik – konflik pengerusakan tempat ibadah. Harapannya kekerasan seperti ini tidak pernah terjadi lagi di bumi Lombok dan di Indonesia.

Berkaitan dengan pelaksanaan program menurut ketua panitia pelaksana Bapak Dewa Mertha Yasa, mengungkap bahwa, jenis program, tujuan program, sasaran program, sudah ada dalam TOR pelaksanaan program. Ada beberapa jenis program penguatan moderasi beragama dalam satu tahun dan didistribusi kepada empat Koordinator bidang, yaitu: bidang kelembagaan dan sistem informasi Bimbingan Masyarakat Hindu; bidang penyuluhan dan pemberdayaan umat; bidang pendidikan agama Hindu; bidang pendidikan keagamaan Hindu. Metode pelaksanaan yang dipilih untuk program, adalah metode ceramah dan diskusi.

Dwi Wahyuni dalam artikel gerakan dialog keagamaan yang ditulis di jurnal Khazanah Sosial, menulis Metode diskusi dapat menjadi model alternatif dakwah dalam pengembangan keilmuan. Metode ini dapat digunakan sebagai proses untuk mengeksplorasi pengetahuan, sosialisasi ilmu, internalisasi penghayatan dan pemahaman isu keagamaan... dengan tetap menjaga bingkai perbedaan atau ikhtilaf diantara peserta diskusi, tidak hanya untuk menyepakati satu kesepakatan saja, tanpa menampung keragaman pendapat peserta diskusi, maka akan tidak efektif dijadikan satu2-satunya metode dakwah (Wahyuni, 2019).

Kegiatan dengan Pendekatan yang hanya menggunakan satu metode yaitu metode ceramah dan diskusi saja akan kurang menarik dan cenderung menimbulkan kejenuhan dan kebosanan dari peserta kegiatan. Masih banyak alternatif dan kombinasi yang bisa dipakai seperti: metode ceramah dan diskusi metode literasi, metode *role play*, metode analisis kasus dengan membahas cara pemecahan kasus yang muncul di masyarakat dengan tepat untuk menemukan inti permasalahan mengapa terjadi intoleransi? Sesuai dengan Prinsip dasar dari teori Lawrence (1973) pendekatan *kontijensi* merupakan cara terbaik dalam perencanaan program, pelaksanaan program, pengawasan maupun pengendalian program, karena ada pada situasi mengidentifikasi karakteristik dari masalah yang sama dengan situasi berbeda, maka cara penyelesaian masalah tersebut akan menjadi berbeda. Menemukan akar masalah intoleransi. Tantangan kehadiran toleransi karena ideologi yang dianut lingkungan masyarakat bertumbuh. Apakah masyarakat cenderung menganut ideologi totaliter akan memunculkan radikalisme dan terorisme, ataukah menganut ideologi individualis dan kapitalis sehingga akan menghasilkan sikap hedonis. Kedua sikap, baik itu sikap radikalisme, terorisme ataupun sikap hedonisme sama-sama memiliki kelemahan dan menjadi tantangan untuk eksistensi ideologi Pancasila yang diakui oleh bangsa Indonesia.

Menurut Antony Giddens, struktur adalah aturan, dan sumberdaya yang terbentuk dari dan membentuk keteraturan praktik sosial melalui aturan. Giddens meyakini bahwa hubungan struktur dengan agen itu bersifat dualitas (timbang Balik), internal, mengekang (*constraining*) namun juga membuat agen mampu (*enabling*) melahirkan tindakan sekaligus. Dualitas struktur itu terjadi dalam praktik sosial yang berulang (*reproduksi sosial*) dan terpola dalam lintas ruang dan waktu (Giddens, 1984:25-27). Melihat pendapat Giddens dalam hal ini panitia yang dibentuk sebagai struktur yang berisi dan mengikuti aturan, terdiri dari sumberdaya manusia, dana, fasilitas, akan membentuk perulangan dalam melakukan pelaksanaan kegiatan penguatan moderasi beragama mengacu pada peraturan yang harus dipatuhi. Karena itu perlu struktur agensi yang kuat untuk membumikan ideologi Pancasila sehingga masyarakat Indonesia mampu terpapar dengan ideologi Pancasila bukan malah sebaliknya terpapar oleh ideologi totaliter dan ideologi individualis. Hubungan agen dalam hal ini pemateri dengan struktur (panitia kegiatan) bersifat dualitas (timbang balik), ada hubungan internal, agak mengekang (*constraining*), walaupun begitu pemateri tetap mampu melahirkan tindakan penguatan ideologi Pancasila dan nilai-nilai luhur leluhur bangsa dan praktek berulang-ulang sampai masyarakat terpapar nilai-nilai moderasi beragama dan ideologi Pancasila sebagai ideologi bangsa.

3. Pemantauan dan Evaluasi dari Implementasi Program Penguatan Moderasi Beragama Bidang Bimas Hindu Kanwil Kemenag NTB.

Setiap pelaksanaan kegiatan suatu program wajib dan perlu untuk dilakukan proses pemantauan dan evaluasi. Proses pemantauan dan evaluasi dari pelaksanaan kegiatan orientasi dengan tema “penguatan moderasi beragama dan penguatan kapasitas lembaga keagamaan Hindu” menurut Ida Bagus Indra Suryadharma, S.Si telah dilaksanakan sesuai kebiasaan yang berlaku secara turun temurun pada Bidang Bimas Hindu Kanwil NTB, bila ada masalah-masalah teknis yang muncul dicarikan jalan keluar secara teknis pula. Bila ada masalah konsep akan langsung dikomunikasikan, dikoordinasikan kepada atasan bilamana ada konsep yang perlu diperbaiki oleh atasan. Hasil pemantauan berkisar pada masalah umum seperti pergeseran waktu pembukaan, atau pergeseran jadwal narasumber karena sesuatu dan lain hal, ketidak hadirannya peserta karena berhalangan atau terlambat datang ke acara.

Menurut Bapak Pande, kegiatan evaluasi dengan menyebarkan angket kepada peserta setelah kegiatan selesai tidak dilakukan. Sehingga dampak program bagi penerima manfaat belum diukur, sedangkan pandangan (Isaac, S & Michael, 1982) sebuah program harus diakhiri dengan evaluasi. Hal ini diperlukan untuk memastikan program tersebut berhasil menjalankan fungsi sebagaimana yang telah ditetapkan sebelumnya. Selama ini evaluasi yang dilaksanakan oleh panitia dalam bentuk evaluasi umum yang hasilnya ditulis pada laporan kegiatan program. Sesuai pendapat (Suharsimi, 2009:297), evaluasi program merupakan suatu rangkaian kegiatan yang dilakukan dengan sengaja untuk melihat tingkat keberhasilan suatu program. Melakukan evaluasi program ialah kegiatan yang dimaksudkan untuk mengetahui keberhasilan dari kegiatan yang telah direncanakan. Evaluasi belum dilakukan, belum ditindaklanjuti untuk melakukan perbaikan pada pelaksanaan program penguatan moderasi beragama berikutnya.

Kesimpulan

Adapun simpulan dari kajian ini, 1) membudayakan moderasi pada perencanaan program penguatan moderasi beragama Bidang Bimas Hindu dengan menyasar penguatan idiologi pancasila, serta penguatan nilai-nilai budaya lokal yang bernafaskan moderasi beragama dengan memenuhi karakteristik: *subsistem, suprasistem, wholism, intere-latedness, purposive behavior, control mechanisem* (sistem Sakti), belum ada feedback (umpan Balik). 2) pendekatan pelaksanaan membudayakan moderasi, belum inovatif. Peserta yang terlibat masih *homogen*. Sasaran program masih sebatas pemahaman toleransi belum kepada merumuskan model toleransi masyarakat multikultur; 3) pemantauan dan evaluasi Pembudayaan moderasi pada Bidang Bimas Hindu Kanwil Kemenag Provinsi NTB belum dilakukan, belum ditindaklanjuti untuk melakukan perbaikan pada pelaksanaan program penguatan moderasi beragama berikutnya.

Saran penulis, 1. pendekatan rencana program bertema moderasi beragama sebaiknya lebih bervariasi seperti lewat penerbitan dan percetakan majalah, penggunaan media massa ber-platform digital, dan lomba-lomba. 2. agensi-agensi (subjek) moderasi beragama sebagai pengubah lebih banyak melibatkan unsur-unsur pimpinan ujung tombak seperti pimpinan tingkat kecamatan, kelurahan, RT, dan pendidik. Dengan syarat utama agent memiliki ketauladanan tinggi; 3. bidang Bimas Hindu Kanwil Kemenag prov. NTB terus berinovasi dalam membudayakan moderasi berlandaskan idiologi pancasila bukan idiologi-idiologi lainnya sampai masyarakat NTB terpapar faham moderasi beragama. 4. program penguatan moderasi beragama Bidang Bimas Hindu perlu dirumuskan model toleransi untuk membangun keberagamaan dalam konteks moderat dalam berkebudayaan idiologi pancasila. 5. sebaiknya dilakukan pemantauan dan evaluasi Pembudayaan moderasi pada Bidang Bimas Hindu Kanwil Kemenag Provinsi NTB salah satunya bisa menggunakan *Formatif Sumatif Evaluation Model*.

Daftar Pustaka

- Akhmadi, A. (2019). Moderasi Beragama Dalam Keragaman Indonesia Religious Moderation in Indonesia ' S Diversity. *Jurnal Inovasi-Diklat Keagamaan*, 13(2), 45–55.
- Amirin, T. M. (2003). *Pokok-Pokok Teori Sistem* (8th ed.). PT. Raja Grafindo Persada.
- Badan Pusat statistik. (n.d.). *Badan Pusat Statistik Provinsi NTB E-data*. <https://ntb.bps.go.id/>
- Bappeda Nusa Tenggara Barat. (2013). *Nusa Tenggara Barat dalam Angka 2013*. <https://bappeda.ntbprov.go.id/ntb-dalam-angka/ntb-dalam-angka-2013/>

- Cresswell, J. W. (2010). *Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*. Pustaka Pelajar.
- Giddens, A. (1984). *The Constitution of Society: Outline of the Theory of Structuration* (I). University of California Press.
- Ibda, H., & Sofanudin, A. (2021). Program Gerakan Literasi Ma' Arif Dalam Meningkatkan Moderasi Beragama (Wasatiyyah Islam) T He Ma' Arif Literation Movement Program in Improving Religious Moderation (Wasatiyyah Islam). *Tatar Pasundan Jurnal Diklat Keagamaan*, 15(2), 166–181.
- Isaac, S & Michael, W. B. (1982). *Handbook in Research and Evaluation*. Edits. <https://www.amazon.com/Handbook-Research-Evaluatio>
- Kementerian Agama. (2019). *Peraturan Menteri Agama Nomor 19 tahun 2019 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama. Pasal 279*. <https://kemenag.go.id/archive/peraturan-menteri-agama-nomor-19-tahun-2019-tentang-organisasi-dan-tata-kerja-instansi-vertikal-kementerian-agama>
- Kementerian Agama. (2020). *Rencana Strategis Kementerian Agama Tahun 2020-2024*. <https://kemenag.go.id/archive/rencana-strategis-kementerian-agama-tahun-2020-2024>
- Kementerian Agama Nusa Tenggara Barat. (2017). *Sejarah Kementerian Agama Nusa Tenggara Barat*. <https://ntb.kemenag.go.id/page/sejarah-kementerian-agama-ntb>
- Kompas.com. (n.d.). (<https://t.me/Kompascomupdate>).
- Pudja, G. (2019). *Bhagawad Gita (Pancama Veda)* (I. W. Maswinara (ed.); 1st ed.). Paramita.
- Raba Manggaukang dan Asamawati MP. (2002). *Fakta-fakta tentang Nusa Tenggara Barat (Lombok & Sumbawa)* (pertama). Yayasan Pembangunan Insan Cipta - pemerintah NTB.
- Suharsimi, A. (2009). *Dasar-dasar Evaluasi Pendidikan*. Bumi Aksara.
- Sumarto. (2021). Penerapan Nilai-nilai Moderasi Beragama di Bali Studi Kerja Sama Rumah Moderasi Beragama IAIN Curup di Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Bali. *Literasiologi*, 7(3), 108–120.
- Tunas, B. (2007). *Memahami dan memecahkan Masalah dengan Pendekatan Sistem* (pertama). Nimas Multima, Anggota IKAPI.
- Wahyuni, D. (2019). Gerakan Dialog Keagamaan Jaringan Kerja Antar Umat Beragama (Jakatarub) Dan Kontribusinya Terhadap Kerukunan Hidup Umat Beragama. *Khazanah Sosial*, 1(1), 49–59.